# MEDIA WORKSHOP DENGAN TEMA MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG BAIK MELALUI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Sehubungan dengan telah selesainya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 atas 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkannya LHP LKPD TA 2019 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah maka BPK berkewajiban untuk memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan tersebut kepada masyarakat luas melalui media, yaitu dengan melaksanakan Media Workshop, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Jum'at, 19 Juni 2020, melaksanakan kegiatan media workshop dengan tema "Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik Melalui Hasil Pemeriksaan BPK". Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen BPK dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Adapun pelaksanaan Media Workshop di masa pandemi covid19 adalah menggunakan perangkat video conference Zoom. Sedangkan insan media yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 14 orang dari berbagai media cetak maupun media elektronik.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana dan bertindak sebagai moderator adalah Kepala Subauditorat Kalteng II, Bpk. M. Suharyanto. Kegiatan ini dihadiri juga oleh para pejabat struktural dan pejabat fungsional.

Dalam pemaparannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas seluruh Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan.

BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya:

#### Redaksi

Editor

Desain Grafis Fotografer

Penanggung Jawab : Ade Iwan Ruswana

Dionisius Yudianto

: Bambang Budi Purwanto : Dica Surya Cardina : Karunia Wibisono : Karuma Wibisono : David Fernando Napitupulu

: Artȟa Magdalena Sitanggang

: Nurul Latifah



- Penetapan BPHTB tidak sesuai ketentuan, di antaranya terkait penetapan NPOPTKP lebih dari satu kali untuk satu wajib pajak dalam satu tahun;
- Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkoordinasi dengan PLN terkait setoran Pajak Penerangan Jalan;
- Aset belum dikapitalisasi dan diatribusi ke aset induknya; Terdapat aset tetap dengan nilai dibawah nilai kapitalisasi dan bernilai Rp0,00 atau Rp1,00; Aset tetap tanah dibawah jalan belum sesuai dengan SK Kepala Daerah tentang Ruas Jalan; Aset tetap dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak; Data aset tetap dalam KIB tidak informatif Aset belum dikapitalisasi;
- Kesalahan berulang atas pengklasifikasian beberapa anggaran belanja daerah yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan/atau output yang
- Pengendalian atas pengelolaan rekening belum sepenuhnya memadai, antara lain rekening yang belum ditetapkan dengan SK Kepala Daerah dan transaksi nontunai belum dilaksanakan pada beberapa belanja daerah yang cukup signifikan; dan
- Beberapa paket pekerjaan tidak sesuai kontrak, baik kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sesi akhir kegiatan ini diberikan ruang tanya jawab untuk insan media cetak dan elektronik baik pertanyaan langsung dengan raise hand atau melalui chat pada aplikasi Zoom. Kegiatan media workshop ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman terkait tata kelola keuangan daerah kepada masyarakat luas dan sebagai kontrol sosial atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinisi Kalimantan Tengah http://palangkaraya.bpk.go.id Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya

#### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kamis, 23 April 2020 pukul 08.30 WIB, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah melantik dan melaksanakan pengambilan sumpah Jabatan Fungsional Pemeriksa untuk 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada kesempatan ini, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap pencegahan Pandemi Covid-19, hanya perwakilan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) yang dilantik secara langsung. Sedangkan PFP lainnya mengikuti jalannya acara melalui video conference. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan didampingi oleh Rohaniwan. Selanjutnya pengambilan sumpah dikukuhkan kembali oleh rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing PFP dan disaksikan oleh para saksi dan para pejabat struktural dan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pemeriksa

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa PFP wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Per MenpanRB Nomor 49 tahun 2018 tentang JFP. PFP harus menjalankan tugas jabatan, menjunjung kode etik, dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu PFP juga harus menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme.





#### KONSINYERING DALAM RANGKA FINALISASI PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019



"Lawan Sastra Ngesti Mulya" (Dengan Ilmu kita menuju kemuliaan)

- Ki Hajar Dewantara -

Di masa pandemi covid 19 saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tetap melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimulai pada pertengahan bulan Maret 2020. Pemeriksaan dilakukan dengan metode Work From Home (WFH) dan menggunakan beberapa prosedur alternatif dalam pemerolehan data dan pengujian.

Pada akhir pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan konsinyering finalisasi penyusunan LHP atas LKPD TA 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 Mei 2018, bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan protokol pencegahan covid 19. Tujuan dilaksanakannya konsinyering adalah mempercepat penyelesaian

Kegiatan dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah I, Bpk. Lukman Hakim dan Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II, Bpk. M. Suharyanto. Konsinyering diikuti oleh 13 tim pemeriksaan yaitu tim pemeriksa Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya. Beberapa agenda penting dari kegiatan konsinyering ini adalah penyeragaman penyajian temuan pemeriksaan sejenis, pembahasan/revi<mark>u o</mark>pini, dan reviu berjenjang oleh Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab Pemeriksaan.

### PENYERAHAN TIGA BELAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 MELALUI VIDEO CONFRENCE

Sabtu, 16 Mei 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 untuk 13 Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Kepala Daerah. Dikarenakan saat ini masih dalam masa pandemi covid 19, maka penyerahan LHP dilaksanakan melalui video conference di ruang VIP Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan, Bpk, Ade Iwan Ruswana didampingi oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang diundang hadir secara online dalam kegiatan tersebut melalui tempat kerja/kediaman masing-masing.

Pemerintah Daerah yang menerima LHP atas LKPD TA 2019 adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya. Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Kepala Perwakilan dan dilanjutkan penandatanganan BAST secara serentak oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Acara dilanjutkan dengan penyerahan LHP yang dilaksanakan dengan pengiriman softcopy LHP kepada email masing-masing Pemerintah Daerah dan sambutan Kepala Perwakilan.

Dalam sambutannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD TA 2019 kali ini dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 sehingga pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. BPK harus melaksanakan pemeriksaan dengan metode Work From Home (WFH) dan melaksanakan beberapa prosedur alternatif yang tepat dan memadai dalam pemerolehan data dan pengujian sebagai dasar untuk menyatakan opini. Dalam pemeriksaan, BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

- Penetapan BPHTB yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkoordinasi dengan PLN terkait setoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN;
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD yang cenderung merugi dan membebani keuangan daerah;

## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TA 2020 PEMERINTAH DAERAH SE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Pada hari Senin – Jumat, tanggal 15 s.d. 19 Juni 2020, bertempat di Auditorium melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I TA 2020 atas 15 entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka dengan pembacaan sambutan Kepala Perwakilan, oleh Pengendali Teknis Subauditorat Kalimantan Tengah I, Bapak Bosman Indra.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari entitas untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi (status 1), tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (status 2), rekomendasi belum ditindaklanjuti (status 3), atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (status 4). Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.



- Rekening milik Pemda yang belum seluruhnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; dan
- Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Setelah sambutan Kepala Perwakilan berakhir, BPK mengumumkan opini atas LKPD TA 2019 yang diperoleh masing-masing Pemerintah Daerah melalui video dan seluruh Pemerintah Daerah yang hadir memperoleh opini WTP "Wajar Tanpa Pengecualian". Kepala Perwakilan mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mempertahankan opini yang dicapai dan BPK akan tetap mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

# HALAL BIHALAL AWALI WFO (WORK FROM OFFICE) PEGAWAI PASCA LEBARAN

Dalam rangka mempererat tali silahturahmi para pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dan bagi umat muslim yang baru selesai merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 H yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2020. BPK Perwakilan Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Halal Bihalal yang diikuti oleh para Pejabat Struktural dan Fungsional Pemeriksa serta dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, baik PTT dan OB. Kegiatan Halal bihalal dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Tengah pada hari Jumat 5 Juni 2020 adalah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan *Covid19* dan menjaga social distancing. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai pasca menjalani bekerja dari rumah (*Work From Home*) sejak maret 2020.

Acara halal bihalal dibuka dengan sambutan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Ade Iwan Ruswana. Kepala Perwakilan mengatakan bahwa halal bihalal merupakan kesempatan yang baik untuk saling memaafkan atas berbagai kesalahan kepada setiap insan. Beliau juga menyampaikan kepada seluruh pegawai agar dapat menjaga kesehatan dimasa Pandemi *Covid19*. Selanjutnya Kepala sekretariat perwakilan Dionisius menjelaskan mengenai aturan new normal atau kebiasaan baru dalam kehidupan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat kepada para pegawai.

Setelah menyampaikan sambutan singkat, acara ditutup dengan doa dan dilanjutkan kegiatan bersalam-salaman dalam jarak minimal 1,5 meter baik dari pejabat struktural maupun antara pegawai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ditengah Pandemi *Covid19*.



#### BPK MENYERAHKAN LHP LKPD TA 2019 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



# BPK MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPD TA 2019 KEPADA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Hari Kamis, 11 Juni 2020 bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Palangka Raya TA 2019 melalui video conference. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk, Ade Iwan Ruswana didampingi oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kota Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya hadir secara online dalam kegiatan tersebut melalui tempat kerja/kediaman masing-masing.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan LHP melalui pengiriman softcopy LHP kepada email Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan. Dalam sambutannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD TA 2019 kali ini dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 sehingga berbeda dengan dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. BPK harus melaksanakan pemeriksaan dengan metode Work From Home (WFH) dan melaksanakan beberapa prosedur alternatif yang tepat dan memadai dalam pemerolehan data dan pengujian sebagai dasar untuk menyatakan opini.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Pencapaian opini WTP ini telah dicapai selama empat tahun berturut-turut sejak LKPD TA 2016. Namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah diantaranya adalah:

- Pemberian NPOPTKP Tidak Sesuai Peraturan Daerah Sehingga Terdapat Potensi Kekurangan Penerimaan BPHTB;
- Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palangka Raya Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- Temuan terkait kelebihan pembayaran atas beberapa kegiatan Perangkat Daerah dan pengadaan barang/jasa serta kekurangan penerimaan negara/daerah.

Kepala Perwakilan mengharapkan Pemerintah Daerah dapat mempertahankan opini yang dicapai dan BPK akan tetap mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Hari Senin 15 Juni 2020, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilaksanakan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2019 oleh BPK RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, BPK RI menyerahkan LHP secara daring (online) melalui video conference. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua DPRD Bapak Wiyatno,SP dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabaran atau yang mewakili. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Dori Santosa sebagai Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI (Tortama VI), Bapak Ade Iwan Ruswana sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa pejabat struktural dan Fungsional Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Bapak Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pencapaian opini WTP ini adalah yang keenam kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya:

- Kesalahan berulang atas pengklasifikasian beberapa anggaran belanja daerah yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan/atau output yang dihasilkan;
- Pengendalian atas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai;
- Realisasi belanja yang bersumber dari sisa dana BOS tahun sebelumnya belum melalui mekanisme pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga belum tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019;
- Pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memadai;
- Beberapa paket pekerjaan tidak sesuai kontrak, baik kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sebagai penutup, Anggota VI BPK RI juga menyampaikan pencapaian Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" yang sudah dipertahankan enam kali berturut-turut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah.

